

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor keuangan merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian masyarakat. Perkembangan dalam sektor keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank harus terus ditingkatkan. Salah satu faktor yang dapat memperbaiki dan meningkatkan sektor keuangan yaitu adanya teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang diperlukan karena sangat efektif dan efisien, serta dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan mudah dipahami. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi membuat suatu lembaga keuangan memerlukan teknologi informasi untuk menunjang aktivitasnya.

Di sekitar kita ada banyak sekali lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang telah banyak membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Lembaga keuangan ini sangat berperan penting bagi masyarakat berpendapatan rendah, pasalnya lembaga keuangan difokuskan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah dan bergerak dalam usaha mikro. Lembaga keuangan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 8 Januari 2013, dijelaskan bahwa Badan Hukum ada dua yakni Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1) menegaskan bahwa :
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Hal tersebut menunjukkan bahwa badan usaha yang paling sesuai adalah Koperasi. Koperasi disebut sebagai gerakan ekonomi rakyat, karena di dalam Koperasi kemakmuran masyarakat bersama yang lebih diutamakan bukan kemakmuran secara individu. Koperasi lebih mengutamakan manfaat dan kesejahteraan anggota. Dengan pernyataan tersebut maka bisa dikatakan keberadaan koperasi sangat penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa koperasi merupakan suatu organisasi yang menjalankan usaha dengan menerapkan jati diri koperasi dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional serta kesejahteraan anggota maupun masyarakat luas dengan berdasakan kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anggota khususnya dan pada umumnya masyarakat non-anggota, hal ini sesuai dengan tujuan Koperasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

Tujuan utama didirikan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota. Agar tujuan Koperasi dapat tercapai, maka Koperasi harus memegang peranan dan fungsi yang diantaranya yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yaitu dengan memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Di Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di Desa Sukawangun, terdapat sebuah Koperasi yang bernama Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPK Wangunwatie). KPPK Wangunwatie ini didirikan pada tanggal 12 Mei 1952 dengan nomor badan hukum No.2108/BH/PAD/ KDK.10.15/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004. KPPK Wangunwatie beralamat di Jl.Wangunwati Rt.005 Rw.002 Desa Sukawangun Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. KPPK Wangunwatie terbentuk dari nasib mantan pekerja perkebunan Wangunwatie (Perkebunan milik Jerman yang berdiri pada tahun 1908). Karena proses nasionalisasi ditinggalkan pemiliknya dan tidak terawat sehingga para pegawai perkebunan berinisiatif meneruskan kegiatan dengan membentuk Koperasi.

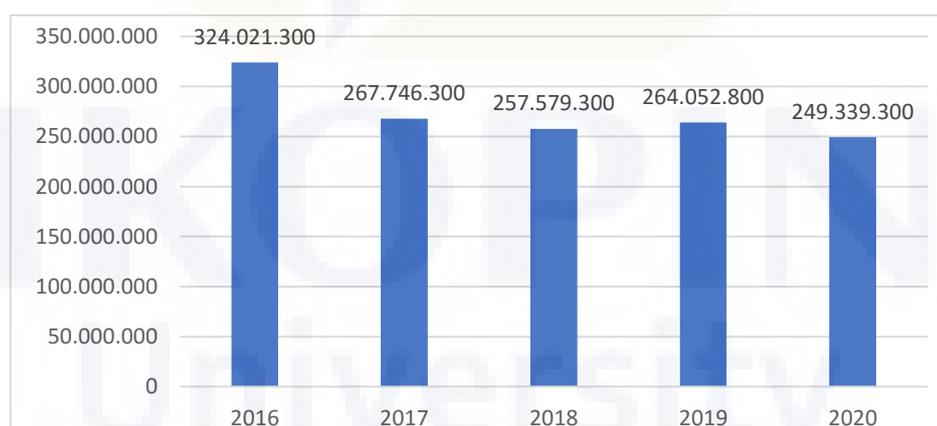
Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2020 jumlah anggota KPPK Wangunwatie saat ini sebanyak 131 orang dimana para anggotanya adalah para petani karet di Desa Sukawangun. KPPK Wangunwatie memiliki dua unit kegiatan usaha yang terdiri :

- 1) Unit Pertanian/Perkebunan Karet (UPK), merupakan unit usaha yang kegiatan usahanya melakukan kegiatan pembibitan pohon karet, pemeliharaan pohon karet, penyadapan lateks, pengolahan karet, pengemasan karet dan pemasaran karet.
- 2) Unit Simpan Pinjam (USP), merupakan unit usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan-simpanan dan tabungan, serta dalam hal menyalurkan dananya yaitu memberikan pinjaman kepada anggota.
- 3) Unit usaha lainnya adalah unit waserda yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi para karyawan. Berdasarkan pengamatan, komoditas barang yang dijual antara lain sepatu bobot, sepatu dragon, sandal, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga
- 4) Unit Usaha Kemitraan Karet Rakyat, merupakan unit usaha yang kegiatan usaha melakukan kemitraan dengan rakyat mengenai karet.

Unit simpan pinjam menurut PP RI No.09 tahun 1995 tentang usaha simpan pinjam yang terdapat pada pasal 1 ayat (3) adalah : **“Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.”**

Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh KPPK Wangunwatie yaitu memberikan penyaluran dana kepada anggotanya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Selain itu, unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie bertujuan untuk mencegah masyarakat ketergantungan pinjaman kepada bank keliling yang sifat pinjamannya menggunakan bunga yang sangat tinggi, sehingga sering kali masyarakat merasa kesulitan untuk melunasi hutangnya.

Unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie memiliki modal yang berasal dari simpanan anggota yang di berikan kepada induk koperasi, kemudian di salurkan kepada unit simpan pinjam untuk menjadi modal tetap tambahan. Selain modal yang diperoleh melalui simpanan anggota, kegiatan simpan pinjam KPPK Wangunwatie juga mendapatkan modal dari pihak luar untuk pemberian pinjaman kepada anggota. Penentuan nilai maksimal sebesar Rp.10.000.000 per anggota koperasi. Adapun informasi data perkembangan kegiatan simpan pinjam KPPK Wangunwatie dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Unit Simpan Pinjam KPPK Wangunwatie

Pada informasi Gambar 1.1 tersebut dapat dilihat grafik perkembangan piutang unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie. Dengan jumlah piutang tersebut unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie membutuhkan sistem informasi akuntansi piutang untuk mengelola keuangan. Namun, dalam prosedur alur peminjaman unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie memiliki prosedur yang kurang efektif. Dimana seluruh prosedur alur pengajuan peminjaman yang dilakukan oleh anggota secara lisan dimulai dari permohonan pengajuan anggota hingga persetujuan dari bendahara koperasi. Proses penyampain informasi secara lisan tersebut mengakibatkan data dan informasi yang disampaikan kurang jelas dan lengkap sehingga dapat mempengaruhi persetujuan pinjaman. Selain itu, belum adanya formulir pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota kepada koperasi. Sehingga koperasi tidak memiliki arsip data anggota peminjam mengenai besarnya pinjaman yang diberikan dan lamanya angsuran pembayaran.

Dalam prosedur operasionalnya unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie belum menggunakan sistem yang baik. Sistem informasi akuntansi piutang yang baik adalah yang dapat mendukung dan membantu memperlancar pekerjaan koperasi dalam melakukan penginputan, pencarian data dan membuat laporan atas piutang pinjaman (Ramadhani et al., 2021). Pada kenyataannya pencatatan piutang unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie ditulis menggunakan buku tulis. Pencatatan pinjaman dicatat kedalam buku pengeluaran kas dan selanjutnya di catat ke dalam buku piutang anggota. Sistem pencatatan dan pengelolaan data kurang efektif, terutama dalam mengatasi pencarian data anggota peminjam, dan data pinjaman anggota. Selain itu, unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie belum

mampu menghasilkan laporan piutang pinjaman dan sering terjadi kehilangan data mengenai laporan piutang. Piutang merupakan aset perusahaan yang terjadi karena adanya transaksi pinjaman. Oleh karena itu diperlukan proses pengelolaan piutang yang dapat mengelola dan mencatat dengan efektif dan efisien (Sulistiani et al., 2018). Dengan jumlah anggota dan jumlah piutang yang cukup banyak akan menyebabkan perhitungan membutuhkan waktu lama dan memungkinkan adanya kesalahan dalam perhitungan. Fokus usaha koperasi dalam hal simpan pinjam sangat membutuhkan sistem yang dapat mengelola data anggota dan transaksi. Dalam hal ini sistem akuntansi pencatatan piutang perlu diteliti untuk mengetahui apakah prosedur sudah sesuai dengan ketentuan, dokumen, dan catatan akuntansi.

Di era modern, teknologi menjadi salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan dan mengembangkan koperasi dengan membantu melakukan pencatatan yang terstruktur dengan komputerisasi, sehingga memperoleh laporan piutang yang jelas dengan menerapkan sistem informasi akuntansi. Namun pada kenyataannya pengurus KPPK Wangunwatie belum mampu menggunakan teknologi dalam melakukan kegiatannya. Awamnya terhadap perkembangan teknologi tersebut menjadikan pengurus koperasi ingin mengembangkan kegiatan unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie khususnya dalam pencatatan piutang yang terkomputerisasi menggunakan *software* Microsoft Excel. Penggunaan *software* tersebut dirasa sangat tepat untuk pengurus unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie karena sangat mudah dipahami (*user friendly*) sehingga dalam pengoperasiannya mudah digunakan serta dapat memudahkan dalam pencatatan keuangan.

Dengan dibangunnya sistem informasi akuntansi piutang berbasis Microsoft Excel, diharapkan dapat membantu pengurus Koperasi dalam mencatat transaksi yang terjadi serta penyajian laporan keuangan yang sistematis dan manfaat yang dirasakan anggota maupun non anggota meliputi peningkatan pelayanan pada anggota menjadi lebih cepat dan efektif serta dari segi keamanan baik data pribadi maupun keuangan lebih terjaga. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pengurus Koperasi adalah proses pencatatan piutang yang masih belum efektif, yaitu pada pencatatan buku kas masuk, buku kas keluar, dan laporan piutang. Oleh karena itu perlunya diterapkan sistem informasi akuntansi piutang berbasis Microsoft Excel sehingga laporan yang dihasilkan merupakan informasi akuntansi yang terkomputerisasi proses pencatatan dapat dilakukan lebih terstruktur dan kesalahan proses perhitungan dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah diuraikan mengenai sistem informasi akuntansi pada badan usaha koperasi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Berbasis Microsoft Excel Pada Unit Simpan Pinjam KPPK Wangunwatie Tasikmalaya”**. Semoga dengan dilakukannya penelitian ini penulis dapat mengetahui prosedur pencatatan piutang dengan menggunakan *software* Microsoft Excel serta dapat membantu unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie dalam melakukan pencatatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Piutang yang sedang berjalan pada Unit Simpan Pinjam KPPK Wangunwatie Tasikmalaya ?
- 2) Bagaimana Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Berbasis Microsoft Excel pada Unit Simpan Pinjam KPPK Wangunwatie Tasikmalaya?
- 3) Bagaimana Perbedaan Sistem Informasi Akuntansi Yang Sedang Bejalan Dan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Berbasis Microsoft Excel Pada Unit Simpan Pinjam KPPK Wangunwatie?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk membangun perancangan sistem informasi akuntansi piutang berbasis Microsoft Excel untuk mempermudah dalam pencatatan, pengelolaan data dan perhitungan keuangan, sehingga permasalahan yang diambil dalam penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian dalam menyusun skripsi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakuan peneliti yaitu, tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi akuntansi piutang berbasis microsoft excel pada unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie yang dapat menjadi solusi masalah yang ada dalam pencatatan dan perhitungan keuangan. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- 1) Membangun perancangan sistem informasi akuntansi piutang berbasis microsoft excel pada unit simpan pinjam KPPK Wangunwatie agar pencatatan dan perhitungan keuangan terkomputerisasi lebih efektif dan efisien.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik, serta kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan dibidang keilmuan khususnya perancangan sistem informasi akuntansi piutang berbasis Microsoft Excel pada koperasi, serta dapat menambah informasi dan referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat untuk membantu badan usaha khususnya koperasi dalam melakukan pencatatan dan perhitungan transaksi yang dapat menghasilkan laporan piutang sehingga dapat digunakan sebagai informasi, serta koperasi dapat melakukan pencatatan dengan efektif dan efisien.